

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan suatu gambaran tentang pencapaian sasaran bahkan tujuan instansi pemerintah hal ini dijabarkan didalam visi, misi maupun strategi instansi pemerintah untuk melihat tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang telah dilaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan program serta kebijakan yang telah ditetapkan pada PP No. 24 tahun 2005 yang berjudul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pembangunan merupakan hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam sebuah kinerja pemerintahan tersebut. Pembangunan yang baik harus mengara pada penciptaan *good governance*. Konsep dari *good governance* timbul karena adanya rasa ketidakpuasan pada kinerja pemerintah yang mana selama ini telah dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. (Ibrahim, 2015)

Sehingga akuntabilitas kinerja adalah salah satu hal yang penting dalam terwujudnya *good governance* pada pengelolaan organisasi sektor publik yang bermakna dalam bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak masyarakat maupun kepada semua pihak yang bersangkutan dengan kepentingan tersebut. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat atau kepada pihak lainnya yang agar pihak tersebut tahu aliran dana yang telah digunakan oleh pemerintah dan merek

dapat menilai pertanggungjawaban tersebut atas seluruh aktivitas yang telah mereka lakukan, tetapi akuntabilitas lebih menekankan bahwa laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, dan politik. (Halim, 2007)

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintah hal ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah yang melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga hal tersebut dapat membuat sistem pemerintahan yang baik dan jujur serta bersih. Keterbukaan ini dilakukan agar dapat mengawasi serta mengevaluasi hasil dari kinerja organisasi agar nantinya tidak ada kesalahpahaman yang akan terjadi kedepannya. Melalui transparansi masyarakat dapat mengetahui nantinya rencana kerja serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan timbal balik atau *outcomes* terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Jika transparansi tidak dilakukan maka kemungkinan adanya penyalahgunaan sumber daya nantinya sehingga akan menyebabkan beberapa ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya, dan menyebabkan beberapa kemungkinan akan terjadinya korupsi apabila ada celah untuk melakukan sebuah kecurangan atau penyelewengan tugas hal tersebut nantinya akan mengakibatkan ketidakadilan bagi seluruh masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi yang mana sudah banyak dilakukan menjadi suatu kewajiban oleh pihak pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan harapan dari publik. Sesuai dengan ayat al-Qur'an yang telah dijelaskan mengenai amanah serta kepercayaan dalam Q.S. Al-Anfal: 27 yang berbunyi:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُبَيَّهَا يَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (Juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Namun, seperti yang kita ketahui sekarang pada kenyataannya masih terdapat beberapa penyalahgunaan atau penyelewengan yang terjadi dalam proses pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dikarenakan kurangnya suatu pengendalian yang dapat mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu diperlukan adanya faktor lain untuk membantu dalam proses pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dalam menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal ini dilakukan agar dapat memberikan kepercayaan bahwa kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan rencana serta tujuan dari pemerintah agar hal tersebut bersifat efisien dan efektifitas.

Pada setiap pemerintahan selalu ada tuntutan kinerja yang baik hal ini sejalan dengan adanya otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah. Kinerja pemerintah dalam hal ini harus di laporkan atau di informasikan kepada para pihak yang berkepentingan dan masyarakat tentang apa saja yang telah mereka lakukan terkait dengan pencapaian hasil kerja, hal ini dikaitkan dengan visi serta misi dari organisasi tersebut. Informasi ini sangatlah berguna untuk menentukan hal apa yang akan dilakukan dalam keputusan selanjutnya sehingga nantinya akan mendapatkan umpan balik sebagai bahan dalam perencanaan kedepannya.

Seperti yang sudah di jelaskan di dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang membahas tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 membahas mengenai Pemerintah Daerah yang sudah menciptakan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana menetapkan bahwa otonomi penuh, luas dan tanggungjawab pada daerah. Namun hal ini belum terlaksana dengan baik di pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga masih ada beberapa kasus korupsi di Provinsi DI Yogyakarta. Seperti Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan sebuah tindakan korupsi pada tahun 2015 namun tersangka baru dijatuhi hukuman pada tahun 2018. Akibat dari tindakan korupsi ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp 900 Juta. (Yogyakarta.bpk.go.id, 2018).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Damayanti dan Hermanto (2018) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Penelitian yang dikukan oleh Ignasius Azevedo Hambur dan Farida Idayati (2019) juga mendapatkan hasil yaitu akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kininerje pemerintah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, transparansi dan kinerja pemerintah ternyata berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintahan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusuma, Diandra Pepi Vabiani (2019) menunjukkan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya masih ada penelitian yang tidak mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian lainnya. Maka dari itu peneliti tertarik kembali untuk meneliti topik tersebut dengan Judul Penelitian **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta”**. Penelitian ini merupakan replikasi murni dari penelitian Evi Damayanti & Hermanto (2018). Perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada obyek penelitian yang dilakukan di Surabaya sedangkan penelitian ini terletak di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Kota Yogyakarta?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Kota Yogyakarta?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah di Kota Yogyakarta.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Bidang Teoritis

- a. Bagi akademis memberikan tambahan referensi untuk penelitian sejenis yang terkait dengan kinerja pemerintah. Serta memberikan pengetahuan mengenai akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal pada sistem pemerintahan.

2. Bidang Praktik

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk mahasiswa lain serta menjadi pertimbangan yang dapat berguna untuk penelitian serupa pada masa yang akan datang.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat umum mengenai kinerja pemerintah agar masyarakat nantinya dapat menilai bagaimana kinerja dari pemerintahan tersebut.

- c. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat dalam mengambil setiap keputusan serta kebijakan pada sistem pemerintahan agar meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.